

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang terletak antara Eropa dan Asia. Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Turki memiliki posisi strategis untuk mendekati diri dengan kawasan Eropa dan negara Islam. Turki yang berbatasan dengan Suriah sebagai negara penghasil pengungsi akibat konflik yang terjadi didalamnya, menjadikan Turki sebagai negara penerima pengungsi terbesar di dunia sejak tahun 2011.

Dinamika pemerintahan Turki dan hubungan Turki dengan negara-negara lain sejak terbentuknya Turki sebagai negara republik yang pada awalnya berorientasi pada negara barat sejak pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk dengan menjalin berbagai kerja sama dan hubungan luar negeri dengan negara Barat dan terus berlanjut pada pemimpin setelahnya. Akan tetapi perubahan mulai terlihat sejak pemerintahan Ozal yang menunjukkan mulai adanya kecenderungan pada negara Timur Tengah. Perubahan ini semakin terlihat pada saat Turki dipimpin oleh Partai AKP sebagai partai yang mendominasi pemerintahan sejak 2002 hingga saat ini. Walaupun adanya perubahan orientasi dari Barat ke Timur Tengah, namun hubungan kerja sama Turki dengan negara Barat tetap terjalin baik hingga masa pemerintahan Erdogan. Hal tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki terkhususnya pada pengungsi yang masuk ke Turki.

Dari berbagai kebijakan yang berkembang di Turki dalam menangani pengungsi, terlihat bahwa adanya perubahan kebijakan yang awalnya terlihat

cenderung akomodatif terhadap pengungsi dengan menerapkan *Open Door Diplomacy* dan *EU-Turkey Statement* mulai mengalami perubahan dengan munculnya kebijakan repatriasi terhadap pengungsi Suriah yang datang pada tahun 2019. Kebijakan Turki terhadap pengungsi yang selama ini cenderung akomodatif secara tiba-tiba berubah menjadi rencana pemulangan pengungsi yang dimulai pada bulan Agustus 2019.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri dari Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis didapati bahwa dari tiga parameter yang menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan kebijakan, hanya dua parameter yang peneliti temukan yang menjadi motif perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah, yaitu *domestic structural parameter* dan *international structural parameter*. Faktor domestik yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah berawal dari percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan pada Juli 2016 mempengaruhi cengkeraman kekuasaan pemerintahan pada saat itu yang akhirnya mengubah sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Disetujuinya referendum April 2017, menandakan diberlakukannya sistem presidensial baru. Dengan adanya sistem presidensial ini memberikan beberapa dampak dalam perpolitikan Turki seperti kekuatan parlemen yang melemah, menurunnya kualitas institusi, meningkatnya jumlah emigrasi dan kaburnya kapitalis, sehingga memberikan pengaruh pada penurunan ekonomi Turki. Terjadinya perubahan pemerintahan juga mempengaruhi perspektif partai AKP dalam masyarakat daerah, di mana sejak berubahnya sistem menjadi presidensial, anggota partai tidak bisa lagi mengungkapkan kritik dihadapan publik

dan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai AKP. Selain itu, perubahan juga terjadi pada lingkungan masyarakat yang awalnya banyak kelompok yang mendukung penanganan pengungsi. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu jumlah pengungsi yang semakin bertambah menimbulkan adanya respon negatif terkhusus bagi penduduk Turki.

Selanjutnya, Adapun faktor internasional yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah terlihat pada mulai adanya perubahan hubungan antara Turki dengan beberapa negara terkait penanganan pengungsi Suriah. Kerja sama Turki-Rusia dalam konflik Suriah mulai mengalami perselisihan sejak Agustus 2016 yang mendorong kedua negara melakukan serangan senjata dan mengoordinasikan kekuatan militer mereka di lapangan. Hubungan antara Turki dengan UE yang awalnya sangat erat dalam menangani krisis pengungsi Suriah. Perubahan terjadi antara Turki dan UE disebabkan oleh kurangnya pendanaan UE terhadap pengungsi yang ada di Turki. Hal ini terjadi karena generasi muda pengungsi Suriah sudah melampaui batas sumber daya yang telah dialokasikan untuk memenuhinya dan akan terus bertambah. Meskipun UE memberikan dana sebesar 6 miliar euro yang telah diberikan sejak 2016, Turki merasa masih dibutuhkannya penambahan dana untuk menangani permasalahan pengungsi. Pengaruh lainnya terlihat dari ketegangan Turki dengan Amerika Serikat juga terlihat dalam penyelesaian konflik Suriah. Persaingan ekonomi, terutama pada saat ketidakpastian ekonomi umum di Turki. Turki diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2019 dengan pengerutan ekonomi sebesar 4%, inflasi yang melonjak naik hingga 12%, dan nilai Lira yang melemah 7,30 terhadap USD. Kondisi tersebut yang akhirnya menjadi alasan Turki

mengubah kebijakannya terhadap pengungsi yang awalnya cenderung akomodatif berubah menjadi rencana repatriasi pengungsi Suriah.

## 5.2 Saran

Pada akhir 2019 telah terjadi pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan dunia dan menjadi permasalahan global termasuk Turki, di mana pada 11 Maret 2020 tercatatnya kasus pertama di Turki dan masih berlangsung hingga 2021 ini. Meski pada penelitian ini tidak ditemukannya pengaruh pandemi terhadap faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah ini, namun akan ada kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah saat dan pasca terjadinya pandemi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar meninjau lebih lanjut mengenai dinamika kebijakan Turki dalam menangani permasalahan pengungsi, menggunakan konsep dan teori yang berbeda agar temuan-temuan selanjutnya dapat lebih baik lagi. Maka dari itu, karya yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

